



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat. Kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun ringkasan LPPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

1. Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$).

IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 (berdasarkan sensus penduduk 2020) mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-6 se Provinsi Lampung dan masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian masa jabatan Periode ke-2 (dua) di tahun anggaran 2024, IPM Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 72.41 Point atau naik sebesar 0,69 Point.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	Point	71,01	71,72 (↑)	72,41 (↑)

Sumber Data : BPS 2024

IPM merupakan ukuran kualitas hidup yang dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar tersebut. IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Adapun Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

Komponen-komponen pembentuk IPM adalah:

- **Umur panjang dan hidup sehat:** Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir
- **Pengetahuan:** Diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak:** Diukur dengan produk nasional bruto per kapita

Capaian Komponen IPM

Komposit dalam perhitungan IPM terdiri dari 4 (empat) Indikator antara lain:

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**
2023 : 73,78 Tahun (↑) sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya.
2024 : 73,96 Tahun (↑) sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**
2023 : 12,26 Tahun (↑) sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya.
2024 : 12,30 Tahun (↑) sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya.

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

2023 : 8,36 Tahun (↑) sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya.

2024 : 8,56 Tahun (↑) sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya.

- **Pengeluaran Perkapita**

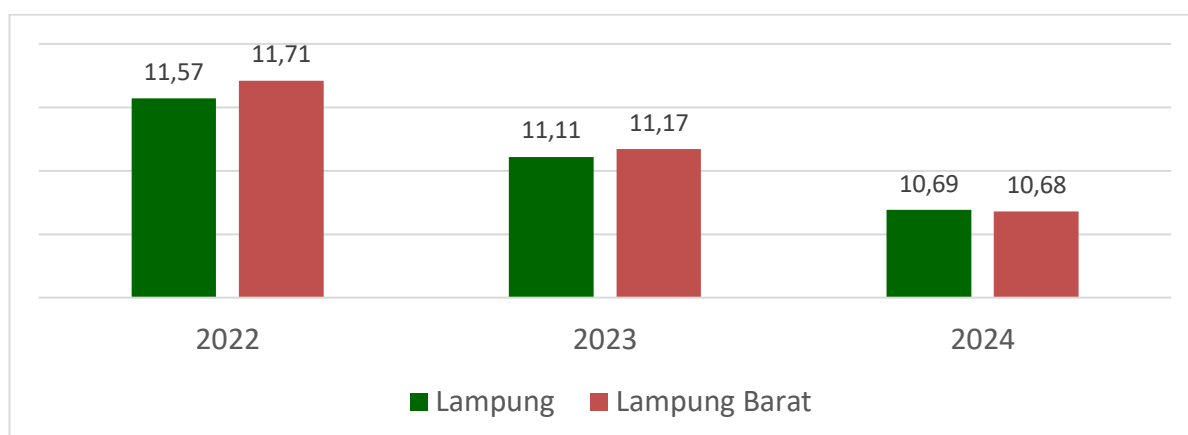
2023 : Rp 10.593.000 (↑) sebesar Rp.418.000 dari tahun sebelumnya.

2024 : Rp 10.965.000 (↑) sebesar Rp.372.000 dari tahun sebelumnya.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat sebesar **11,17%** sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Barat sebanyak **34.370 Jiwa**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%. Pada tahun 2024 capaian kinerja kemiskinan menunjukkan hasil yang positif, Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 10,68%, turun 0,49% dari tahun sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sendiri pada tahun 2024 turun menjadi **33.430 Jiwa**.

Grafik 1.1
Persentase Angka Kemiskinan, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat 2022-2024



Sumber Data : BPS 2024

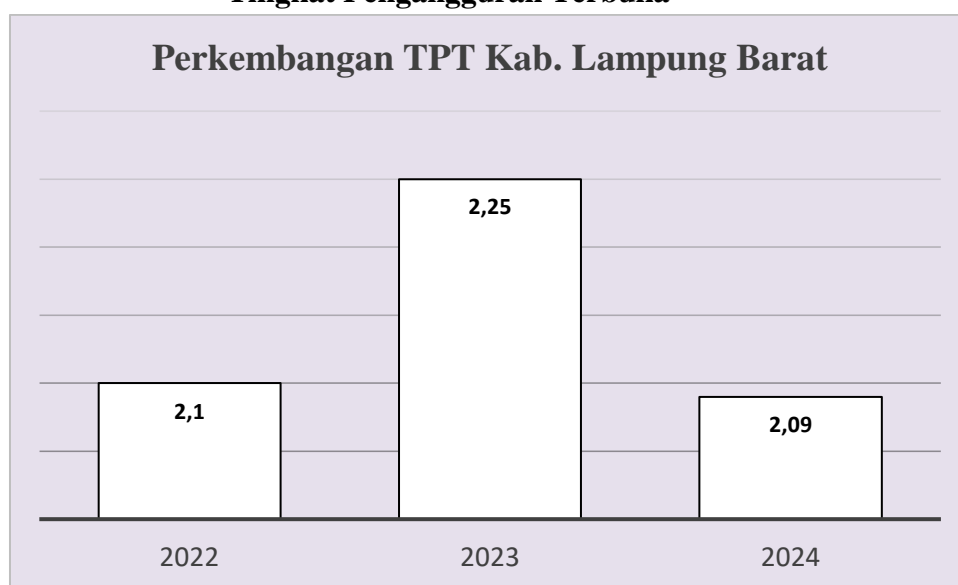
Jika dilihat dari Grafik di atas, angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 dan tahun 2023 masih di atas Provinsi namun pada tahun 2024 Angka Kemiskinan Lampung Barat di bawah Provinsi Lampung.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini dapat menjadi masalah dalam perekonomian, karena dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPT antara lain: Pertumbuhan ekonomi, Upah, Inflasi, dan Investasi.

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,10% atau sebesar 4.272 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami sedikit kenaikan yang sebelumnya sebesar 0,15%. Namun, pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 2,09% atau sebesar 4.043 Jiwa, turun sebanyak 0,16%. Kenaikan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat dari Tabel di bawah ini.

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber Data : BPS 2024

d. Pendapatan Perkapita

Pada tahun 2023 Perekonomian Kabupaten Lampung Barat masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 44,43% meskipun distribusinya mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 46,23%, Untuk pertumbuhan tertinggi didapat dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang sebesar 15,33% naik sebesar 1% lebih dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor / lapangan usaha terendah adalah Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar RP.5,504 triliun rupiah, meningkat tahun 2022 yang sebesar Rp.5.258 triliun rupiah, atau meningkat sebesar $\pm 3\%$. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar RP.9,01 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp.8,28 triliun rupiah, atau meningkat sebesar $\pm 4\%$.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2023, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 28,86 juta rupiah bertambah 2,06 juta rupiah lebih dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 26,80 juta rupiah lebih. Namun, Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indicator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2
PDRB PERKAPITA

INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023
PDRB Per Kapita	Juta (Rp)	24,61	26,80 (↑)	28,86 (↑)

Sumber Data : BPS 2023

e. Gini Rasio/Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2023, Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di wilayah Lampung Barat. Nilai rasio gini berkisar anatar 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio gini diupayakan mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2024 ini, indeks gini Kabupaten Lampung Barat tercatat sebesar 0,290 dan pada tahun 2023 gini ratio Kabupaten Lampung Barat sebesar 0,274 poin. Angka tersebut turun sedikit jika dibandingkan dengan Gini Rasio pada 2022 yang sebesar 0,284 Point. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 dan tahun 2022.

Tabel 1.3
Gini Ratio

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
RASIO GINI	Point	0,284	0,274	0,290

Sumber Data : BPS 2024

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya:

a. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	67,72%	95,17%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,48%	95,16%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,92%	78,19%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	71,84%	70,03%

Sumber : Dinas Pendidikan Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yaitu sebesar Rp. 66,100,534,700,- dengan program Pengelolaan Pendidikan. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Pendidikan

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37,873,169,300	36,492,966,799	96.36 %
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20,556,205,200	19,351,655,397	94.14 %
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5,456,736,000	5,147,756,000	94.34 %
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,214,424,200	1,983,238,000	89.56 %
	Jumlah	66,100,534,700	62,975,616,196	95.27 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data anak tidak sekolah yang terkendala data dari Pekon/Desa seluruh Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Penganggaran masih menyesuaikan dengan kemampuan daerah;
- 3) Sarana dan prasarana semua jenjang yang belum memadai.

b. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,42	1,06
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	95,49%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	98,90%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	97,23%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,62%	95,15%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	92,23%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,11%	98,39%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,39%	92,14%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	9,58%
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	92,19%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	98,67%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	74,45%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	88,67%

Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan yaitu sebesar Rp. 2,907,087,678,- dengan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Kesehatan

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	659,550,000	651,430,500	98.77 %
2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	125,822,000	115,681,500	91.94 %
3.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	18,000,000	18,000,000	100.00 %
4.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	30,844,000	26,071,500	84.53 %
5.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	428,943,100	422,193,100	98.43 %
6.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	121,000,000	119,557,425	98.81 %
7.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	56,000,000	54,820,000	97.89 %
8.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	27,500,000	27,182,500	98.85 %
9.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita DM	346,742,188	345,660,675	99.69 %
10.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	75,000,000	64,679,750	86.24 %
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	844,742,850	835,838,900	98.95 %
12.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	172,943,540	147,044,500	85.02 %
	Jumlah	2,907,087,678	2,828,160,350	97.29 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan pengumpulan data dari pemegang program (terkendala pelaporan dari puskesmas yang belum tepat waktu);
- 2) Keterbatasan kompetensi SDM Kesehatan yang ada;
- 3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Belum Menghasil Capaian Yang maksimal dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai	45,72%	1,47%
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	53,27%	100%
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,20%	4,15%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	88,57%	88,47%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,65%	100%
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%

7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57,38%	58,79%
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp. 889,203,657,- dengan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	549,988,900	549,988,900	100 %
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	339,214,757	339,214,757	100 %
Jumlah		889,203,657	889,203,657	100 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Mata Air berada di Kawasan Hutan Lindung; dan
- 2) Tidak diperbolehkan menggunakan sumur bor untuk proses pengambilan mata air

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Capaian
		Kinerja Tahun 2023	Kinerja Tahun 2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupatenkota	0%	0%
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupatenkota	0%	0%
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab kota yang ditangani	73,92%	0,54%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,79%	5,82%
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	0%

Sumber : Dinas PUPR Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar Rp. 45,000,000,- dengan Program Pengembangan Perumahan. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45,000,000	0	0 %
	Jumlah	45,000,000	0	0 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah Tidak terdapat pencapaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dikarenakan tidak terjadinya bencana alam sekala besar.

- e. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	30%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%

4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,05%	0,74%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	75%	75%
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,8 menit	15,7 menit

Sumber : BPBD Lampung Barat dan Satuan Pol PP, Penyelamatan dan Damkar Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 4,782,450,425,- dengan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum), Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan), Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar). Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	399,225,900	399,225,900	100.00 %
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	94,313,000	94,313,000	100.00 %

3.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,130,531,225	4,000,958,968	96.86 %
4.	Investigasi Kejadian Kebakaran	20,710,000	20,710,000	100.00 %
5.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	46,800,300	46,800,300	100.00 %
6.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458	90,870,000	90,870,000	100.00 %
	Jumlah	4,782,450,425	4,652,878,168	97.29 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll);
- 2) Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai serta mendirikan bangunan bertingkat pada wilayah jalur gempa yang terkadang tidak memenuhi standar konstruksi bangunan anti gempa;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
- 4) Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah;
- 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia aparat Kebencanaan;
- 6) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi;

- 7) Kurang/minimnya dukungan anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebencanaan;
- 8) Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

f. Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	100%	100%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Lampung Barat, 2025

Berdasarkan realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial yaitu sebesar Rp. 1,509,051,500,- dengan Program Rehabilitasi Sosial dan lainnya. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Sosial

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	430,346,000	429,041,350	99.70 %
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	164,845,000	164,762,595	99.95 %
3.	Pemberian Bantuan oleh Kementerian Sosial RI kepada Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar	913,860,500	913,860,500	100.00 %
	Jumlah	1,509,051,500	1,507,664,445	99.91 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada anggaran untuk pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga; dan
- 2) Tidak ada anggaran untuk fasilitasi pembuatan NIK/bukti kepemilikan NIK

3. Hasil EPPD Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 25 ayat (2) menyatakan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada PP 13 Tahun 2019 pasal 26 menyatakan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi makro ini dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Selanjutnya pada PP 13 Tahun 2019 pasal 29 menyatakan bahwa Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja. Penilaian capaian indikator kinerja didasarkan pada bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. Bobot nilai tersebut ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

1. peringkat kinerja provinsi;
2. peringkat kinerja kabupaten; dan
3. peringkat kinerja kota.

RLPPD tahun 2024 ini dilaporkan bersamaan dengan Pelaporan LPPD Tahun 2024 yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Hasil LPPD Tahun 2024 ini akan disampaikan capaian kerjanya pada tahun 2026. Sedangkan untuk capaian kinerja LPPD Tahun 2023 yang dilaporkan Tahun Anggaran 2024, belum dipublikasi hasilnya karena masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Rencana publikasi capaian kinerja tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah pada Tanggal

25 April 2025 nanti. Perkembangan hasil EPPD Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Hasil EPPD Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2014-2024

Tahun EPPD	Dasar Hukum	Nilai	Status
2015	KEPMENDAGRI Nomor 800-35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014	3,2169	Sangat Tinggi
2016	KEPMENDAGRI Nomor 120-10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015	3,2147	Sangat Tinggi
2017	KEPMENDAGRI Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016	3,3435	Sangat Tinggi
2018	KEPMENDAGRI Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017	3,0269	Sangat Tinggi
2019	Piagam dari Kemendagri	3,3059	Sangat Tinggi
2020	Rekap dari Inspektorat Provinsi Lampung	3,3173	Sangat Tinggi
2021	SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	2,15	Rendah
2022	SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	2,6028	Rendah
2023	Belum Rilis (menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri)	-	-

Sumber: Data diolah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat, 2025

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.. Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI 10 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Tabel 2.17
Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah Lampung Barat Tahun 2014-2023

No.	Uraian	Predikat
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya memperoleh predikat “Opini WTP dari BPK RI 10 Kali Berturut-turut Laporan Keuangan Tahun 2014 hingga 2023”. Hal ini didasari oleh Piagam Penghargaan Nomor: KEP-156/WPB.08/2024 Tanggal 29 November 2024 yang diberikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Berikut Piagam penghargaan dimaksud.



4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Unaudited) Tahun 2024, realisasi pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mencapai Rp. 1.110.660.464.574,08,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.119.418.377.234,92,-. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa realisasi belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mencapai Rp. 1.066.027.122.752,77,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.130.182.927.936,00,-.

Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.18
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.119.418.377.234,92	1.110.660.464.574,08	99,22
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.260.946.657,32	71.292.283.868,08	102,93
4.1.01	Pajak Daerah	15.567.332.172,00	15.822.072.460,00	101,64
4.1.02	Retribusi Daerah	2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.482.770.679,32	47.449.246.124,17	104,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	98,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	963.684.407.500,00	956.625.034.394,00	99,27
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PERPU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.119.418.377.234,92	1.110.660.464.574,08	99,22
5	BELANJA DAERAH	1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32
5.1	BELANJA OPERASI	787.052.867.520,00	732.476.704.550,77	93,07
5.1.01	Belanja Pegawai	478.369.824.473,00	443.825.422.543,02	92,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.580.882.920,00	245.883.654.304,75	92,93
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.336.230.502,00	40.232.656.643,00	99,74
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	163.892.744.934,00	155.180.317.163,00	94,68
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.805.825.852,00	19.977.066.162,00	96,02

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.479.225.145,00	88.928.047.259,00	92,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.774.708.633,00	4.705.517.410,00	98,55
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19
	Jumlah Belanja Sebelum Transfer	953.096.357.536,00	889.618.223.152,77	93,34
5.4	BELANJA TRANSFER	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32
	SURPLUS / (DEFISIT)	-10.764.550.701,08	44.633.341.821,31	-414,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan PERPU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan PERPU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		55.398.457.002,39	

Sumber: LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 (Unaudited)

5. Inovasi Daerah

Pada dasarnya, inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik. Harapannya dengan adanya inovasi daerah kinerja pemerintah daerah berikut pelayanan publiknya dapat menunjukkan peningkatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usulan inovasi daerah tidak hanya untuk Pemerintah Daerah saja melainkan juga dibuka bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mampu menduduki peringkat 25 tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Secara Nasional, Kabupaten Lampung Barat mampu meraih indeks 12500 dengan predikat “Sangat Inovatif”. Hasil penilaian secara nasional tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019. Berikut ini daftar inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024:

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Portal Data Digital	Kegiatan Inovals ini menggunakan Aplikasi Appsheet yaitu dapat mengintegrasikan dengan berbagai sumber data, termasuk spreadsheet, database, atau layanan web. Ini memungkinkan penggunaan data yang ada digabung dalam aplikasi yang dibangun
2	BPBD	Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah	Inovasi Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan sistem informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Dimana sistem informasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengelolaan serta penyajian data dan informasi

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Himpun Adat Paksi Pak Sekala Bekhak	Inovasi yang bertujuan untuk pelestarian budaya Sekala Bekhak dengan cara menghimpun masyarakat adat dari Kerajaan Paksi Pak Sekala Bekhak dan seluruh Paksinya untuk bermusyawarah mengenai pelestarian budaya di Bumi Sekala Bekhak
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Sinema (Sistem Monitoring Kinerja Pegawai)	Aplikasi SINEMA (Sistem Monitoring Kinerja Pegawai) merupakan sistem penilaian aktivitas harian dilakukan secara berjenjang. PNS (Pegawai Negeri Sipil) melaporkan aktivitas hariannya, kemudian atasan langsung melakukan verifikasi pekerjaan yang dikerjakan
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Paper Prov (Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi)	Pertukaran pemuda antar provinsi adalah salah satu program pemerintah dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, sekaligus mempersiapkan menghadapi tantangan global dimasa mendatang
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	SAYA PANCASILA (Pemantapan Ideologi Pancasila Kepada Perangkat Desa)	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur desa tentang pemantapan ideologi Pancasila merupakan suatu kegiatan yang memberikan wawasan kebangsaan luas kepada aparat-aparat desa sehingga mengurangi masalah-masalah kesenjangan sosial dilingkungan masyarakat desa, dan pembaharuan kegiatan ini memberikan buku saku pedoman ideologi Pancasila.
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon	Pembentukan Pkk Kopi (Kompak, Proaktif Dan Inovatif)	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota PKK di Pekon dan Meningkatkan peran PKK Pekon dalam membantu program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
8	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Kopi Raja (Kopi, Rawit Dan Jahe)	Inovasi ini memiliki tujuan Meningkatkan pendapatan petani kopi dengan diversifikasi tanaman kopi dengan tanaman cabe rawit dan jahe.
9	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Pegas (Pelayanan Ternak Gratis)	PEGAS (Pelayanan Gratis) memudahkan pelayanan, penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan, sehingga bertambah populasi ternak/hewan yang sehat yang pada akhirnya populasi ternak meningkat di wilayah Kabupaten Lampung Barat
10	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Madu (Penerapan Pengendalian Hama Terpadu)	Inovasi ini dilakukan dalam upaya agar petani mampu menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya secara mandiri, petani perlu dipandu/dibimbing untuk dapat mengamati/ mengidentifikasi dan menganalisa masalah dalam pengelolaan dikebunnya
11	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Gulali (Gulma Hilang Lahan Indah)	Inovasi pengurangan penggunaan herbisida di lahan sehingga peningkatan produksi tanaman kopi dapat melimpah
12	Dinas Perhubungan	Sisakula (Sistem Masa Berlaku Uji Kir Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat)	Kegiatan Ini merupakan kegiatan pemeriksaan kondisi kelaikan jalan kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor wajib uji dimana kendaraan tersebut di uji kendaraan secara berkala setiap 6 bulan sekali

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
13	Dinas Pp, Kb, Pp Dan Pa	Pm Gak Keder (Pembangunan Masyarakat Dengan Penegakan Keadilan Dan Kesetaraan Gender)	Inovasi ini merupakan kegiatan Implementasi dari Pengarusutamaan Gender (PG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral
14	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	Sistem Perencanaan Online (Sisperon) Dpmpstsp Lb	Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengarsipan dokumen perencanaan agar dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh OPD di kemudian hari
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon	Bina Pekon (Pembinaan Keuangan Dan Pembangunan Pekon)	Inovasi ini merupakan bentuk Pembinaan konsul secara online dapat membuat kinerja aparatur desa lebih efektif dan efisien, tidak memakan waktu untuk yang bersangkutan harus datang ke kantor
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pokdarwis Air Terjun Pelangi	Kegiatan ini bertujuan agar menjadikan objek wisata di Lampung Barat khususnya wisata Air Terjun Pelangi menjadi objek wisata yang unik sehingga mampu mendatangkan banyak wisatawan ke Lampung Barat, terbentuknya model kawasan wisata yang di dasari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Tourism Sustainable)
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Liga Pm (Liga Pemuda Mandiri)	Liga pemuda mandiri (Liga PM) merupakan kompetisi/perlombaan yang mengikutsertakan club dari tiap tiap kecamatan di kabupaten Lampung Barat untuk bertanding Sepak bola.
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	S-Parekraf Lb (Sosialisasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)	Inovasi ini Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Barat akan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat.
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Tic-Lb (Tourist Information Centre - Lampung Barat)	Inovasi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memperkenalkan dan mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata baik alam maupun budaya yang kita miliki untuk bisa diketahui dan dikenal oleh para calon wisatawan.
20	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pm Santun (Pajak Mandiri Sistem Aplikasi Non Tunai)	Aplikasi PM Santun (Pajak Mandiri Sistem Aplikasi Non Tunai) yakni agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak daerah dimana saja dan kapan saja, sehingga tidak ada tunggakan pajak daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Umroh Dan Wisata Rohani	Inovasi ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat Pemerintah Daerah mempunyai agenda memberangkatkan umroh bagi warga muslim dan warga non muslim untuk berwisata rohani ke Negara sesuai agama yang diyakininya
22	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Safa'at (Safari Jumat)	Safari Jumat adalah untuk menjalin silaturahmi mempertemukan sesama umat muslim secara langsung demi terjalinnya komunikasi, harmonisasi dan menaga kebhinekaan suku, aliran dan yang utama adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
23	Dinas Lingkungan Hidup	Pedal Online (Pelayanan Dokumen Lingkungan Online)	Inovasi ini bertujuan Mempermudah, mempercepat dan menghemat proses pelayanan penerbitan dokumen lingkungan hidup secara online
24	Dinas Lingkungan Hidup	Sedang Berseri (Sekolah Berbudaya Lingkungan, Bersih, Sehat Dan Asri)	Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penjareta (Penyusunan Jadwal Retensi Arsip)	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Bku Jaman Kupat (Bimtek Kearsipan Untuk Menjamin Keselamatan Dokumen Kabupaten)	Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menata dokumen/arsip dari 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 15 kecamatan dan 5 kelurahan di Lampung Barat. supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman
27	Dinas Ketahanan Pangan	Pelatihan Dapur B2sa	Inovasi Pelatihan Dapur B2SA Ini Sebagai Upaya Perbaikan Gizi Di Masyarakat Sebagai Salah Satu Upaya Strategis Untuk Pencegahan Dan Penurunan Stunting Yang Saat Ini Menjadi Program Prioritas Pemerintah
28	Dinas Ketahanan Pangan	Bantuan P2l Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	Inovasi Pemberian Bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) digunakan untuk penanganan stunting yang beririsan dengan penanggulangan inflasi dan penanganan kemiskinan ekstrim
29	Dinas Ketahanan Pangan	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Daerah/Kab	Inovasi ini bertujuan agar Agar para petani terdorong untuk melakukan pertanian secara organik sehingga produk yang dihasilkan terbebas dari residu pestisida maupun logam berat yang pada akhirnya konsumen atau masyarakat dapat mengonsumsi pangan segar yang sehat dan aman
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Latipe Lambar (Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pelopor Lampung Barat)	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan pelatihan pemuda pelopor Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu program pemerintah dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ideologi dan kebangsaan serta mencintai tanah air sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan global di era mendatang.
31	Dinas Penanaman Modal PTSP	Survey Perizinan Online (Super On) Dpmpmsp Lb	Inovasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mengajukan penerbitan perizinan. Sehingga jika ada kendala dalam proses pengajuannya, bisa langsung dikonsultasikan secara daring (online) dengan operator
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Budi Selancar (Buku Digital Akses Literasi Lancar/E-Book)	Inovasi Budi Selancar merupakan inovasi yang memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai Media informasi yang efektif Media pelajaran yang efisien, Media untuk mengungkapkan ide baru, Bisa diperoleh

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			dengan gratis atau download dan Dapat dibuka dan dipelajari kapan saja dan dimana saja
33	RSUD Alimuddin Umar	Pengelolaan Limbah Medis Padat	. Inovasi ini merupakan implemetasi pengelolaan limbah medis yang terkelola baik berdampak positif pada aspek kesehatan, lingkungan, dan kepatuhan hukum
34	RSUD Alimuddin Umar	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Alimuddin Umar	Inovasi sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen.
35	RSUD Alimuddin Umar	Sistem Informasi Kepuasan Pelayanan (SIKEP) RSUD Alimuddin Umar	Inovasi ini merupakan terobosan dalam upaya mengumpulkan Permasalahan dan keluhan mengenai pelayanan yang dilakukan harus segera ditindaklanjuti agar tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus terjaga dengan baik
36	Dinas Kesehatan	PM SIKAB (Perencanaan Mantap, Sistematis, Informatif, kredibel dan Akuntabel)	Inovasi Memberikan kemudahan dalam penyusunan kegiatan yang lebih terarah, efektif dan efisien guna tercapainya sasaran dan Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pencapaian pembangunan Kesehatan di kabupaten Lampung Barat
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Si Madu (Sistem Informasi Pemanfaatan Data Terpadu)	Kegiatan Inovasi ini bertujuan untuk Mendukung Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Untuk menyediakan data yang akurat, efektif dan base data bagi pemerintah daerah maupun nasiona
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kacar-Kucur (Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur)	Melalui Inovasi Kacar Kucur Masyarakat terutama non muslim Mendapatkan Pelayanan kependudukan khususnya akta perkawinan dengan mudah, jelas dan cepat sehingga pelayanan buku nikah bagi Non Muslim dapat berjalan dengan baik.
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KIA KESLAH (Kartu Identitas Anak Ke Sekolah-Sekolah)	Inovasi Ini merupakan inovasi kemudahan Membuat kartu identitas anak terbilang praktis dan mudah bahkan bisa dilakukan mandiri tanpa bantuan dari pihak ketiga
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaku Hebat dan Cepat	Inovasi Ini merupakan Implementasi dari sistem Siak Terpusat, Siak Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat
41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PELANDUK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling)	Inovasi ini memiliki tujuan yaitu Tersediannya pelayanan prima bagi masyarakat pada urusan administrasi kependudukan dan Meningkatkan jangkauan pelayanan adminstrasi kependudukan terutama kartu keluarga, perekaman KTP L, dan pencetakan KTP L

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BIAS (berbagi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial)	Inovasi ini memungkinkan bagi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan Publik melalui pemanfaatan media informasi melalui penggunaan media sosial dalam upaya berbagi informasi terkait adminitrasi kependudukan sehingga masyarakat akan lebih mudah menjangkau pelayanan yang diberikan
43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pitulas KTP El Ku Khatong	Inovasi ini memberikan kemudahan Bagi Masyarakat dalam melakukan pembuatan KTP Elektronik sehingga lebih mudah dalam mendapatkannya secara cepat, tepat dan efisien
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Verval PPPKE	Inovasi ini merupakan inovasi untukm memberikan kemudahan perangkat daerah di kabupaten lampung barat dalam mendapatkan data berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data p3ke ini sehingga pemberian bantuan tepat sasaran
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SI ITIK (Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik)	Inovasi SI ITIK memberikan bekal pengetahuan dan pemahamn bagi partai politik tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD
46	Badan Riset dan Inovasi Daerah	SURVEY IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Tujuan Inovasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yaitu untuk mengukur indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Lampung Barat.
47	Bagian SDA	TIMKOR Energi	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Bagian Sumber Daya Alam melalui Inovasi Tim Koordinasi Energi bertujuan untuk memaksimalkan potensi energi yang ada terutama energi baru terbarukan. Energi terbarukan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah krisis energi dan juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tagar Budaya (Penetapan Cagar Budaya)	Penetapan cagar budaya adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya kepedulian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di di Lampung Barat yang memiliki sejarah dan nilai pengetahuan yang tinggi agar lebih terjaga, terawat dan dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi yang memerlukannya.
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Numerasi Gasing	Numerasi Gasing merupakan inovasi daerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten lampung barat, kegiatn ini merupakan kegiatan peningkatan Numerasi dengan menggunakan metode Gasing (Gampang, Asik, dan Menyenangkan).
50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pusat Kuliner Liwa	Inovasi ini merupakan inovasi sebagai upaya untuk menata keberadaan PKL yang berjualan malam hari di seputaran Tugu Liwa, agar PKL terlihat tertib demi keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Liwa,
51	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Mentari (Melayani Tera Satu Hari)	Mentari merupakan Inovasi Layanan tera dan tera ulang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			mengenai pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
52	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Ketersediaan Stok Barang	Inovasi ini merupakan inovasi berupa monitoring harga yang diharapkan mampu memberikan informasi atau sinyal kondisi situasi pasar yang terjadi dilapangan serta memberikan antisipasi terhadap perilaku pasar.
53	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pengembangan Informasi Barang Kebutuhan Pokok Melalui Digital Berbasis Web	Inovasi ini merupakan Inovasi Pembuatan laporan harga sembako secara periodik oleh Dinas Koperindag Lampung Barat serta dapat digunakan dalam upaya membangun sistem yang dapat menentukan pusat perdagangan komoditas sembako tertentu di Kabupaten Lampung Barat.
54	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pembinaan Bersama Tenaga Penyuluhan Lapangan (TPL-IKM)	Inovasi yang berfokus untuk Mengukur keberhasilan Inovasi dengan membandingkan antara sasaran yang harus dicapai dengan mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan bersama-sama dengan pengusaha IKM
55	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Lamban Kemasan	Inovasi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat (Dinas Koperindag) yang fungsinya bukan hanya dapat mencetak berbagai jenis kemasan melainkan dapat juga melakukan percetakan seperti banner, stiker dan one way sehingga dapat memberikan kemudahan untuk keperluan usaha lainnya
56	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	KELOLA PASCA PANEN (Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan)	Inovasi ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, peningkatan produksi pertanian juga harus didukung melalui penanganan pasca panen yang baik sehingga mampu menekan kehilangan hasil yang terjadi pada saat panen serta untuk meningkatkan kualitas produksi gabah.beras yang dihasilkan sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi
57	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SL AGRIBISNIS (Sekolah Lapang Agribisnis)	Sekolah Lapang Agribisnis (SLA) adalah sekolah tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka dan bersifat tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) guna mengembangkan dan memberdayakan petani/keompok tani/masyarakat melalui sistem pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan bidang agribisnis.
58	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu)	Mengimplementasikan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) skala luas berupa hamparan dalam upaya pengamanan produksi untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan yang dituangkan dalam Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT).
59	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SL PSA (Sekolah Lapang Pengelolaan Sumber Air)	Inovasi ini memberdayakan masyarakat tani dalam pengamanan areal pertanaman padi dari SL Iklim melalui penerapan teknologi adaptif di lahan usahatani

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan
60	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SL IKLIM (Sekolah Lapang Iklim)	Melalui Inovasi ini dapat memberdayakan masyarakat tani dalam pengamanan areal pertanaman padi dari SL Iklim melalui penerapan teknologi adaptif di lahan usahatani terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan.
61	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SELA PAPA MANGAN (Sekolah Lapang Pasca Panen Tanaman Pangan)	Melalui Inovasi ini petani dapat mempraktekkan prinsip GAP dan GHP dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan terutama dari segi financial
62	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	GIAT PENGEMBANGAN PUPO (Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik)	Inovasi ini menekankan pada Peningkatan keterampilan petani serta dan pengembangan pola pertanian yang minim biaya dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan Pupuk Organik untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah dan Memotivasi petani untuk memanfaatkan limbah pertanian yang ada menjadi pupuk organik, dengan harapan kesuburan/unsur hara tanah akan meningkat.
63	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	SL PPO (Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik)	Inovasi ini merupakan sarana pelatihan petani untuk memproduksi pupuk organik dengan memanfaatkan limbah disekitar lahan sebagai produk yang lebih bernilai guna. Sehingga, petani dapat mengurangi biaya produksi dan menambah hasil produksi.
64	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	GERDAL HAP-TP (Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan)	Inovasi ini bertujuan Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keahlian 400 orang petani di 10 lokasi sentra produksi padi Kabupaten Lampung Barat dalam mengalisis data dan informasi agroekosistem, sehingga pemahaman dan penerapan PHT pada masyarakat petani semakin berkembang.
65	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PESTA ANAK (Pemeriksaan Post Mortem pada Ternak)	Inovasi daerah ini bertujuan memastikan hewan hasil sembelihan dapat berkualitas baik dan tidak terjangkit penyakit.
66	Dinas Perkebunan dan Peternakan	SI RADA HERAN (Vaksinasi Rabies pada Hewan Peliharaan)	Inovasi ini bertujuan mendistribusikan vaksin anti rabies dan melaksanakan vaksinasi rabies pada hewan peliharaan di Kabupaten Lampung Barat.
67	Dinas Perikanan	BAGAN (Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Nelayan)	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Nelayan ini menjadi sarana berbagi informasi dan ilmu bersama kelompok nelayan sehingga mampu mendorong penumbuhkembangan kelompok nelayan yang memberikan dampak pada peningkatan perekonomian anggota kelompok

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
68	Dinas Perikanan	UBI RAMBAT (Unit Pembenihan Rakyat Lampung Barat Hebat)	Tujuan umum yang akan dicapai dalam kegiatan Ubi Rambat (Unit Pembenihan Rakyat Lampung Barat Hebat) yaitu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui cara menumbuh kembangkan kegiatan usaha budidaya ikan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya, memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja produktif
69	Dinas Perikanan	TENGGIRI (Teknik Mengolah Beragam Ikan Terkini)	Melalui Inovasi ini dapat Menambah keterampilan pelaku usaha dalam mengolah produk untuk meningkatkan ragam olahan dan kualitas produk hasil perikanan
70	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	INBUKER (INFORMASI BURSA KERJA)	Manfaat informasi pasar kerja/ Informasi Bursa Kerja adalah membantu individu dan organisasi memahami kondisi pasar kerja dan membuat keputusan yang relevan terkait informasi pekerjaan/bursa kerja di Kabupaten Lampung Barat
71	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PM INDAH(PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH)	Inovasi ini bertujuan untuk Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pengembangan Inovasi Daerah yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Pekon dan Unit Instansi daerah lainnya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
72	Dinas Sosial	VERVAL DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bermanfaat untuk pendataan yang sesuai dengan kondisi sosial di lapangan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tepat sasaran dalam penggunaannya
73	Inspektorat Kabupaten	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah suatu upaya dalam pembangunan sistem pencegahan korupsi. sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
74	Dinas Lingkungan Hidup	KEHATI (Keanekaragaman Hayati)	Tujuan inovasi ini adalah : Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa, pendukung penyedia bibit, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, ruang terbuka hijau dan penambahan tutupan vegetasi
75	Dinas Ketahanan Pangan	HATOK CADANG (Penambahan Stok Cadangan Pangan)	Kegiatan ini merupakan implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
76	Dinas Ketahanan Pangan	REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Inovasi ini merupakan inovasi berupa pendaftaran/Registrasi PSAT merupakan salah satu bentuk penjaminan/ suatu bentuk ijin edar dengan pemberian dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan adanya Registrasi PSAT ini akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat/konsumen, serta akan mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk
77	Dinas Ketahanan Pangan	PERLUASAN AKSES INFORMASI KETERSEDIAAN, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Inovasi ini merupakan inovasi penyediaan Data/informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai dapat menjadi bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi dan harga pangan di Kabupaten Lampung Barat sehingga Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang tepat.
78	Dinas Ketahanan Pangan	KETERJANGKAUAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN PANGAN POKOK	Kegiatan Inovasi ini bertujuan untuk menyerap produk pertanian dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis, mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis dan memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis dengan harga yang terjangkau dan wajar.
79	Dinas Ketahanan Pangan	Peran Strategis dalam Penyediaan Pangan untuk Penanganan Rawan Pangan Pasca Bencana	Inovasi ini bertujuan Menyalurkan bahan pokok bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan bencana lainnya
80	Dinas Sosial	MAS AJI (MASYARAKAT SADAR JIWA)	Inovasi MAS AJI (masyarakat sadar jiwa) merupakan inovasi pemenuhan hak atas dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khusus orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan dengan langkah-langkah dan penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu.
81	Dinas Sosial	Puskesmas SLRT Bagi PPKS (Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Inovasi ini dilakukan untuk · Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT dan Puskesmas disemua pekan/Kelurahan dan Optimalisasi Pelayanan Sosial terhadap Masyarakat
82	Dinas PP, KB, PP dan PA	Kerak TNI Manunggal KB Kesehatan	Kegiatan Program TNI Manunggal KB Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			upaya pencapaian sasaran program TNI Manunggal KB Kesehatan perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh oleh masyarakat sehingga pelaksanaan TNI Manunggal KB Kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu baik Instansi terkait maupun masyarakat secara umum
83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SISTEM PERIZINAN DIGITAL (SI PERDI) DPMPTSP LB	Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengakses dokumen terkait perizinan
84	Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Festival Sekala Beghak ke 9	Inovasi ini merupakan inovasi yang bertujuan Menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara untuk mengunjungi Kabupaten Lampung Barat dengan Festival Budaya Sekala Bekhak yang mempunyai daya tarik wisata budayanya.
85	Bagian Organisasi	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Tujuan penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima
86	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	Klinik Pengadaan Barang dan Jasa	Klinik pengadaan mempunyai manfaat yaitu memberikan layanan konsultasi kepada organisasi pengadaan pada perangkat daerah sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.
87	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pengembangan Geopark Kaldera Suoh Lampung Barat	Pengembangan Geopark Kaldera Suoh, Memberikan manfaat ekonomi lokal berupa potensi pariwisata dan ekonomi kerakyatan, pengembangan geopark juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keanekaragaman hayati dan budaya.
88	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	PUP-GF (Pelayanan Usulan Pensiun melalui Google Form)	Tujuan dari inovasi ini memudahkan pelayanan usulan pensiun bagi pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti melalui aplikasi google form.
89	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Padik Google (Pengelolaan Arsip Diklat Kepemimpinan Berbasis Elektronik dengan Memanfaatkan Layanan Google Drive)	Tujuan dari inovasi ini yaitu memudahkan pengerjaan dalam pengelolaan arsip diklat kepemimpinan dalam bidang pengembangan di BKPSDM Lampung Barat
90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ibel Online (Pelayanan Online Via Whatsapp dalam Pembuatan Ijin Belajar)	Inovasi pelayanan pembuatan ijin belajar melalui online yaitu pemanfaatan aplikasi WA (whatsapp) yang diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam mengajukan pembuatan ijin belajar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Barat.
91	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	GS-PUNDALAKI (Google Spreadsheet Pengumpulan Data Laporan Kinerja) BKPSDM	Inovasi ini merupakan upaya pengumpulan data laporan kinerja menggunakan aplikasi Google Spreadsheet dapat membuat proses pengumpulan data menjadi efektif dan efisien. Hal ini merupakan bentuk dari inovasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada public guna mendukung laporan perencanaan yang akuntabel
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	Penyelenggaraan Proses Belajar Kesetaraan (BPPM) diajukan diajukan sebagai salah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan masyarakat yang tidak dapat bersekolah di pendidikan formal atau putus sekolah.
93	Dinas Perkebunan dan Peternakan	TERAKOTA (TERASERING KELOMPOK TANI)	Manfaat yang diperoleh ialah dengan adanya inovasi ini, tingkat kesuburan lahan meningkat dan kemungkinan erosi lahan menurun
94	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PELATUK (PENYULUHAN UNTUK KELOMPOK TANI)	Petani yang mendapat penyuluhan dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dengan lahan dan air di usaha taninya, cara mengawetkan atau memperbaiki atau melestarikan lahan dan air tanah.
95	Dinas Perkebunan dan Peternakan	LAHAN BISNIS (PENGOLAHAN PASCA PANEN AGRIBISNIS)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat sedang dan akan terus melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani pekebun, melalui program yang diberi nama "Lahan Bisnis" (Pengolahan Pascapanen Agribisnis) dengan tujuan petani dan pekebun kopi dapat meningkatkan nilai jual kopi dan komoditi perkebunan lainnya.
96	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bunga Rijantes	Kabupaten Lampung Barat mempunyai daya tarik wisata yang masih tergolong baru yaitu sebuah area yang ditanami spesies bunga langka yang bernama Bunga Rinjantes dan Bunga Angrek Arungdina terletak di Desa (Pekon) Padang Tambak Kecamatan Way Tenong, Inovasi ini merupakan inovasi berupa taman yang ditumbuhi Bungan rijantes dan angrek aurungdina
97	Dinas Perkebunan dan Peternakan	NASI PADANG (VAKSINASI SAPI PETERNAK DI KANDANG)	Inovasi ini bertujuan memudahkan peternak menangani berbagai macam penyakit yang menyerang ternaknya, dengan adanya inovasi ini, peternak tidak harus bersusah payah karena medik veteriner siap menyambangi peternak langsung di kandangnya masing-masing
98	Dinas Perkebunan dan Peternakan	JUSKU HALAL (JURU SEMBELIH KURBAN HALAL)	Tujuan inovasi ini ialah tersedianya juru sembelih yang mampu menerapkan tata cara penyembelihan secara halal.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
99	Dinas Perkebunan dan Peternakan	AL-IKHSAN (Alsintan untuk Intensifikasi Kopi dan Hewan Sembelihan)	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan mengadakan kegiatan berupa sosialisasi dan pemberian bantuan berupa alsintan yakni alat dan mesin pertanian untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan dan peternakan. Dengan bantuan alat dan mesin pertanian, diharapkan petani dapat mencapai hasil yang lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	SELANGKAH PASTI (Sekolah Lapang Kualitas Air dan Lahan, Petani Sejahtera Teredukasi)	Melalui sekolah lapang ini, diharapkan petani dapat meningkatkan kapasitas yang berujung pada meningkatnya kualitas hasil pertanian dan perkebunan sehingga taraf hidup petani dapat meningkat. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, diharapkan taraf hidup petani dapat ditingkatkan secara signifikan, menghasilkan komunitas yang lebih sejahtera dan pertanian yang lebih produktif serta berkelanjutan
101	Dinas Perkebunan dan Peternakan	KOPITANI (Kontrol Pengendalian Organisme Tanaman Kopi)	Tujuan Inovasi Daerah ini yaitu Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan poktan/gapoktan terhadap teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (SL -PPHT) tanaman kopi
102	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PENTAS PETANI (Peningkatan Kualitas Perbenihan Tanaman Kopi)	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan jenis klon unggul lokal Lampung Barat demi meningkatkan Produksi yang berdampak pada peningkatan Kesejahteraan Petani kopi Lampung Barat.
103	Bagian Hukum	LOLA JANGAN DIHUKUM (Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Inovasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Barat adalah berupa aplikasi yang mengcover permohonan penerbitan produk hukum daerah secara otomatis. Aplikasi ini berfungsi untuk merekam secara online proses pengerjaan produk hukum mulai dari usulan perangkat daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
104	Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penataan Ruang Daerah	Tujuan Inovasi ini adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	GENERASI (GERAKAN MODERNISASI DAERAH IRIGASI)	Tujuan inovasi ini untuk inventarisasi aset daerah irigasi menggunakan aplikasi Google Earth dan e-PAKSI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen aset daerah irigasi. Irigasi merupakan suatu sistem yang penting

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			dalam pertanian karena berfungsi untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya air secara optimal guna meningkatkan hasil pertanian
106	Dinas Kesehatan	PM Narsis (Pembinaan Melekat Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Teradministrasi)	Inovasi ini merupakan kegiatan berupa Memberikan rekomendasi praktik dalam pelayanan kesehatan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
107	Satuan Polisi Pamong Paraja, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran	PESAN PM (Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup - POL PP Melayani)	Inovasi ini bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai ketaatan terhadap peraturan daerah serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
108	Satuan Polisi Pamong Paraja, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran	POL PP Peduli ODGJ Memanusiakan Manusia	Kegiatan inovasi di bidang penanganan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) merupakan implementasi untuk mewujudkan Ketentraman dan Kertertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kabupaten Lampung Barat.
109	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sistem Evaluasi Pelaporan Online (Si Eveline)	Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah SKPD dan OPD terkait dalam mengakses dan menggunakan dokumen evaluasi dan pelaporan
110	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jok Bau Bang Li (Pojoek Baca Untuk Pengembangan Literasi)	Inovasi ini bertujuan untuk mendukung pendidikan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengingat Pojoek Baca merupakan satu-satunya yang bersifat umum dalam layanannya yang dirintis, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.
111	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pusling (Pelayanan Perpustakaan Keliling)	Inovasi ini bertujuan membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan nonformal kepada publik luas; memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada publik; memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik; meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat
112	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rata Tiffis (Realisasi Administrasi Terencana, Akurat dan Efisien)	Tersedianya pelaksanaan program kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan Produktifitas kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.
113	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pojoek Baca Digital (Pocadi)	Inovasi POCADI merupakan tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital (ebook). Koleksi e-book yang ada di POCADI berasal dari konten yang tersimpan pada lokal server dan juga konten iPusnas, yang dapat diunduh menggunakan aplikasi play store

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
114	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Strategi Peningkatan Percepatan Pelaporan Keuangan (SPERPAT PORANG)	Inovasi ini Bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan pengembangan system pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD kegiatan pelaporan Capaian Kinerja
115	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bensmart (Bentor Perpustakaan Keliling Untuk Kesejahteraan Masyarakat)	Inovasi Bentor perpustakaan keliling merupakan wujud aksi Pemkab Lambar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi
116	Dinas PP, KB, PP dan PA	POJOK CURHAT PUSPAGA BEGUAI JEJAMA	USPAGA adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program Pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga
117	BAPPEDA	Gerakan Terpadu Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Lampung Barat (GARDU CANTIK)	Gardu Cantik merupakan aksi serentak dan terpadu yang dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan Gardu cantik meliputi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif merupakan pelaksanaan integrasi dari program kegiatan perangkat daerah dengan pemerintah pekon serta stakeholder terkait di Kabupaten Lampung Barat. Program kegiatan intervensi gizi sensitif antara lain, gerakan pangan mandiri, gemar ikan, dapur B2SA, dll,
118	BAPPEDA	Program Penanggulan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu dengan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat (Si-Pakis Hebat)	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan untuk Masyarakat Hebat Sejahtera (Si Pakis Hebat) merupakan Sistem Informasi yang mempermudah pekerjaan dalam penanganan data Kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat secara cepat dan akurat. Aplikasi Si-Pakis Hebat menyajikan data-data penganggulan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat yang disajikan dalam bentuk agregat dan grafik
119	Dinas Ketahanan Pangan	LAGA TONGSIS (LAPORAN HARGA STOK PANGAN STRATEGIS)	Menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang pasokan dan informasi harga pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi dan harga pangan di Kabupaten Lampung Barat.
120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BERBAHASA LAMPUNG (PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN S-I BAHASA LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)	Kegiatan Beasiswa s-1 Bahasa Lampung merupakan salah satu inovasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten lampung Barat. Kegiatan inovasi ini diberi nama BERBAHASA LAMPUNG (Beasiswa S-1 Bahasa Lampung) . Inovasi ini merupakan kegiatan pemberian Beasiswa kepada siswa-siswi lulusan SMA/SMK di kabupaten Lampung barat.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
121	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	BANG RONAL (PERLOMBAAN PERMAINAN TRADISIONAL KHAS LAMPUNG BARAT)	Kegiatan yang berbentuk perlombaan olahraga tradisional ini dilaksanakan dalam rangka merayakan hari Besar kenegaraan Indonesia, dengan mengangkat permainan permainan tradisional khas Lampung Barat
122	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Juri Bola (Jumat Hari Berolahraga)	Kegiatan ini merupakan bentuk aktivitas olahraga yaitu senam Bersama yang dilaksanakan setiap hari jum'at yang bertempat di lapangan PEMDA kab.Lampung barat, kegiatan ini di ikuti oleh seluruh ASN dan THLS di lingkungan pemerintah kabupaten lampung barat
123	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SILAT SAKA (Seleksi dan Pelatihan dan Pasukan Paskibraka)	Dengan adanya kegiatan ini memiliki kesempatan untuk mengepresikan atau menunjukan kemampuan yang di miliki pemuda-pemudi yang terbaik yang ada di khususnya di Kabupaten Lampung Barat
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PEMBANGUNAN LAMBAN PANCASILA DENGAN METODE BORED FILE	Inovasi dalam pembangunan gedung budaya memberikan kontribusi yang positif terhadap pelestarian warisan budaya, pendidikan, ekonomi, seni, dan lingkungan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk masyarakat menghargai dan mengalami kekayaan budaya mereka, sambil mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemajuan yang berkelanjutan
125	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON (EPP)	Inovasi ini memiliki tujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember melalui kegiatan evaluasi pekon. Melalui kegiatan kompetisi lomba pekon atau EPP membangkitkan semangat kompetitif antar warga desa/pekon, sehingga dapat meningkatkan pembangunan pekon.
126	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU DALAM KONVERGENSI STUNTING	Inovasi ini merupakan kegiatan pelatihan kepada kader posyandu, makan akan didapatkan kader yang mampu melayani masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya posyandu kepada masyarakat.
127	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	NEGERI DI ATAS AWAN	Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu tumbuhnya keberdayaan masyarakat Pekon Wisata, yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat kesejahteraan sebenarnya dalam prioritas pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
128	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	PM PAREKRAFLB (Publikasi Media Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Barat)	Maksud dan tujuan kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memperkenalkan dan mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata baik alam maupun budaya yang kita miliki untuk bisa diketahui dan dikenal oleh para calon wisatawan dan juga masyarakat di sekitar Lampung Barat.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
129	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Festival Sekala Beghak ke 8	Festival ini merupakan Helat besar pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya khas Lampung Barat yang diadakan sekali setiap tahun. Menampilkan pertunjukan seni budaya khas Lampung Barat seperti Nyambai, Orkes Gambus, Karnaval Budaya, dan Pameran UMKM dari kecamatan-kecamatan
130	Dinas Ketahanan Pangan	Pelatihan Pangan Lokal	Inovasi ini bertujuan untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk mengolah potensi bahan pangan lokal menjadi produk olahan pangan yang sehat dan aman serta berdaya saing sehingga memberikan nilai ekonomis dan nilai tambah pengolahan dan pemanfaatan produk pangan lokal yang berkelanjutan
131	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	INFOMARSI BURSA KERJA	Manfaat informasi pasar kerja adalah bahwa itu dapat membantu individu dan organisasi memahami kondisi pasar kerja dan membuat keputusan yang terkaitkerjaan. Misalnya, individu dapat menggunakan informasi pasar kerja untuk memahami kondisi pasar kerja dan membuat keputusan tentang pekerjaan, gaji, dan pendidikan lanjutan.
132	Bagian Organisasi	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Tujuan penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Sumber : BRIDA Lampung Barat, 2024